

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBASAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA SAUDARA Drs. H. BAHAUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Drs. H. Bahauddin, pensiunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan, telah dianggap lalai yang mengakibatkan hilangnya kendaraan dinas milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan berupa 1 (satu) unit motor;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Kehilangan BMN pada Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Kankemenag Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Nomor: IJ.Inv/LHA/ PS.05/0069/2013 tanggal 28 Juni 2013, dinyatakan bahwa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak terdaftar dalam SIMAK BMN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan, pemegang kendaraan dinas yaitu Saudara Drs. H. Bahauddin telah meninggal dunia dan kasus kehilangan kendaraan dinas tersebut sudah lama, sehingga tuntutan kerugian negara kepada Saudara Drs. H. Bahauddin dapat dihentikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Pembebasan Kerugian Negara kepada Saudara Drs. H. Bahauddin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PEMBEBASAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA Drs. H. BAHAUDDIN.

KESATU ...

KESATU : Menetapkan Pembebasan Kerugian Negara kepada Saudara
Drs. H. Bahauddin atas hilangnya kendaraan dinas milik
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan
berupa 1 (satu) unit motor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM